

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
NOMOR : KEP.06.00.00-626/K/2001
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWASAN
KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN NOMOR: KEP. 06.00.00-286/K/2001
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PERWAKILAN
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah diundangkannya Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, perlu dilakukan perubahan nama Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Propinsi Daerah Istimewa Aceh;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor: KEP-06.00.00-286/K/2001 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 114; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4134);
2. Keputusan Presiden Nomor 155/M Tahun 1999;
3. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen;
4. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen;
5. Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor: KEP-06.00.00-080/K/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
6. Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor: KEP-06.00.00-286/K/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

NOMOR: KEP.06.00.00-286/K/2001 TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA PERWAKILAN
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN
PEMBANGUNAN.

Pasal I

Mengubah Lampiran Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor: KEP.06.00.00-286/K/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal II

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Oktober 2001
KEPALA BADAN PENGAWASAN
KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN,

ttd.

ARIE SOELENDRU

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN
PENGAWASAN KEUANGAN DAN
PEMBANGUNAN

NOMOR : KEP.06.00.00-626/K/2001

TANGGAL : 18 Oktober 2001

NAMA, LOKASI, DAN WILAYAH KERJA PERWAKILAN BPKP

Nomor	Nama	Lokasi	Wilayah Kerja
1.	Perwakilan BPKP Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam	Banda Aceh	Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kabupaten/Kota di wilayahnya
2.	Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara	Medan	Provinsi Sumatera Utara dan Kabupaten/Kota di wilayahnya
3.	Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat	Padang	Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten/Kota di wilayahnya
4.	Perwakilan BPKP Provinsi Riau	Pekanbaru	Provinsi Riau dan Kabupaten/Kota di wilayahnya
5.	Perwakilan BPKP Provinsi Jambi	Jambi	Provinsi Jambi dan Kabupaten/Kota di wilayahnya
6.	Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan	Palembang	Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Bangka Belitung serta Kabupaten/Kota di wilayahnya
7.	Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu	Bengkulu	Provinsi Bengkulu dan Kabupaten/Kota di wilayahnya
8.	Perwakilan BPKP Provinsi Lampung	Bandar Lampung	Provinsi Lampung dan Kabupaten/Kota di wilayahnya
9.	Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta I	Jakarta	Provinsi DKI Jakarta dan Instansi Pemerintah Pusat I
10.	Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta II	Jakarta	Provinsi Banten serta Kabupaten/Kota di wilayahnya dan Instansi Pemerintah Pusat II
11.	Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat	Bandung	Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten/Kota di wilayahnya
12.	Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah	Semarang	Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten/Kota di wilayahnya
13.	Perwakilan BPKP Provinsi DI Yogyakarta	Yogyakarta	Provinsi DI Yogyakarta dan Kabupaten/Kota di wilayahnya
14.	Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur	Surabaya	Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten/Kota di wilayahnya

15.	Perwakilan BPKP Kalimantan Barat	Provinsi	Pontianak	Provinsi Kalimantan Barat dan Kabupaten/Kota di wilayahnya
16.	Perwakilan BPKP Kalimantan Timur	Provinsi	Samarinda	Provinsi Kalimantan Timur dan Kabupaten/Kota di wilayahnya
17.	Perwakilan BPKP Kalimantan Selatan	Provinsi	Banjarmasin	Provinsi Kalimantan Selatan dan Provinsi Kalimantan Tengah serta Kabupaten/Kota di wilayahnya
18.	Perwakilan BPKP Provinsi Bali		Denpasar	Provinsi Bali dan Provinsi Nusa Tenggara Barat serta Kabupaten/Kota di wilayahnya
19.	Perwakilan BPKP Nusa Tenggara Timur	Provinsi	Kupang	Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Kabupaten/Kota di wilayahnya
20.	Perwakilan BPKP Sulawesi Selatan	Provinsi	Makasar	Provinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten/Kota di wilayahnya
21.	Perwakilan BPKP Sulawesi Tengah	Provinsi	Palu	Provinsi Sulawesi Tengah dan Kabupaten/Kota di wilayahnya
22.	Perwakilan BPKP Sulawesi Utara	Provinsi	Manado	Provinsi Sulawesi Utara dan Provinsi Gorontalo serta Kabupaten/Kota di wilayahnya
23.	Perwakilan BPKP Sulawesi Tenggara	Provinsi	Kendari	Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tenggara dan Kabupaten/Kota di wilayahnya
24.	Perwakilan BPKP Maluku	Provinsi	Ambon	Provinsi Maluku dan Provinsi Maluku Utara serta Kabupaten/Kota di wilayahnya
25.	Perwakilan BPKP Irian Jaya	Provinsi	Jayapura	Provinsi Irian Jaya, Provinsi Irian Jaya Tengah dan Provinsi Irian Jaya Barat serta Kabupaten/Kota di wilayahnya

KEPALA BADAN PENGAWASAN
KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN,
ttd.
ARIE SOELENDRO